

**EVALUASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT LAMONGAN BERBASIS PEDESAAN (GEMERLAP) DI DESA LABUHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN (Studi Pada Budidaya Ikan Kerapu)**

**Niken Puspitasari**

1204074080 (S1 Administrasi Negara, FISH, UNESA) puspitasariniken02@gmail.com

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si**

0029077404 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) prabawatiindah@yahoo.com

**Abstrak (Times New Roman 10, Bold, spasi 1, spacing before 12 pt, after 2 pt)**

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pembangunan pedesaan mengalami beberapa permasalahan yaitu potensi yang dimiliki masyarakat desa belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari permasalahan tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) sebagai wujud tekad Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program GEMERLAP di Desa Labuhan dilihat dari kriteria efektifitas masih dikatakan belum efektif dibuktikan dengan bantuan yang tidak memberikan manfaat untuk petani Desa labuhan. Program ini juga dirasa kurang efisien dalam hal dana, tidak adanya fasilitator dan konsultan pendamping, serta Program GEMERLAP di Desa Labuhan tidak tepat sasaran apabila diberikan kepada masyarakat Labuhan dengan usahanya yang sudah berkembang. Dalam kriteria responsifitas, respon masyarakat petani kurang ditandai dengan tidak adanya kemauan dalam mengajukan permohonan bantuan melalui proposal. Meskipun Program GEMERLAP di Desa Labuhan dikatakan telah merata namun perataan tersebut dilakukan oleh petani kerapu Desa labuhan sendiri. selain itu dari kriteria kecukupan, bantuan dari Program GEMERLAP juga sangat sedikit sehingga belum mencukupi kebutuhan petani kerapu Desa Labuhan. Dengan adanya penelitian ini peneliti memberikan rekomendasi agar dapat dilanjutkan dengan memenuhi saran yaitu mengubah kebijakan menjadi bersifat bottom-up, selain itu menyelesaikan kendala berupa dana dengan menambah anggaran dana untuk pelaksanaan program selanjutnya, melakukan pendampingan untuk mengembangka produk Desa Labuhan ikan kerapu menjadi produk olahan lain, selain itu program GEMERLAP diberikan kepada kelompok yang lebih tepat serta diharapkan pelaksana GEMERLAP dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pelaksanaan GEMERLAP.

**Kata Kunci:** Evaluasi, GEMERLAP

**Abstract**

Lamongan as one of the regions that implement rural development encountered some problems, the problem is potential of rural communities can not be used optimally. Of these problems then the Lamongan Government make a program named Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) Program as a form of government determination to improve the welfare of rural society. The aim of this research is to describe the evaluation of GEMERLAP programm in Labuhan village District of Brondong, Lamongan. The results of this research indicate that the GEMERLAP program in Labuhan village have not reached the goals set. The result showed GEMER:AP Program in Labuhan village **viewed** of the effectiveness criteria are not effective proved with the aid that does not provide benefits for farmers labuhan village. The program also is less efficient in terms of funds, lack of facilitators and co-consultants, and GEMERLAP program at Labuhan is not effective when given to people Labuhan the effort that has developed. In the responsiveness criteria, the farmers response is low, it's proved by a lack of willingness to apply for assistance through the proposal. Although the GEMERLAP program in the village of Labuhan said to have been uneven but it is done by the farmers themselves. other than that of the criteria of adequacy, the help of GEMERLAP Program is also too less so that insufficient needs of the labuhan farmers. By this research, the researchers give recommendation to be continued with the suggestion that changing the policy into a bottom-up, in addition to complete the obstacles in the form of funds to add the budget funds for the implementation of subsequent programs, mentoring to develop products Labuhan village such as kerapu into other refined products , besides GEMERLAP program given

to groups of more precise and expected gemerlap implementor can do monitoring and evaluation habitually in the implementation of the GEMERLAP

**Keywords:** Evaluation, GEMERLAP

**PENDAHULUAN** (TIMES NEW ROMAN 10, BOLD, SPASI 1, SPACING BEFORE 12 PT, AFTER 2 PT)

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soaial. Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik seperti gedung atau pembangunan jalan. Widjaja (2005:36) menyatakan bahwa pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena pada dasarnya pembangunan itu dilakukan di daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Pembangunan daerah, terutama pembangunan desa perlu dilakukan mengingat banyaknya penduduk yang tinggal di desa dibandingkan kota. Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan.

Adisasmita (2006:33) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan dilihat dari pelibatan peran serta masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu daerah yang melaksanakan program pembangunan pedesaan yaitu Kabupaten Lamongan dimana desa sebagai pemerintah terkecil yang jumlahnya cukup besar (nomor 2 se Indonesia), sebanyak 474 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 1.499.971 jiwa dan 1.348.259 jiwa pada tahun 2013 (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang bertempat tinggal, berkeluarga, dan bermatapencaharian di desa, baik sebagai petani/buruh tani, peternak maupun usaha perikanan dan usaha lainnya.

Selama ini permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah: (Pedoman Umum GEMERLAP): (1) Secara umum mata pencaharian masyarakat Kabupaten Lamongan di sektor pertanian (petani, nelayan, peternak dan pembudidayaan ikan), namun dalam proses produksinya belum ditunjang oleh alsintan (alat mesin pertanian); (2) Infrastruktur pedesaan relatif tidak memadai, sehingga masyarakat desa kesulitan dalam mengakses layanan; (3) Terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, nilai

tambah (value added) lemah karena biasanya dijual dalam bentuk bahan baku belum hasil olahan; (4) Kelembagaan kelompok dan motivasi wirausaha lemah, serta belum ditunjangnya informasi dalam pelayanan produk;(5) Lemahnya masyarakat dalam megakses permodalan, karena pada umumnya usaha yang digeluti oleh masyarakat desa bersifat non bankable.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat program yang dinamakan Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan. GEMERLAP merupakan perwujudan tekad dari Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membangun ekonomi masyarakat dengan berbasis pada pedesaan. Program ini dimulai sejak tahun 2011 dimana pembiayaannya bersumber pada APBD Kabupaten Lamongan, bantuan Propinsi Jawa Timur, Kementrian melalui SKPD vertikal terkait, kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggungjawab perusahaan (CSR), dan Swadaya Masyarakat. Program ini merupakan perwujudan tekad yang kuat dari pemerintah Kabupaten Lamongan yang didukung lewat Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 untuk membangun ekonomi masyarakat dengan berbasis pada pedesaan.

Salah satu desa yang menerima Program GEMERLAP adalah Desa Labuhan. Desa Labuan menjadi desa penghasil ikan tambak terutama ikan kerapu terbesar di Kecamatan Brondong. Sebenarnya petani tambak Desa Labuhan Kecamatan Brondong mulai membudidaya kerapu sejak tahun 1999. Di desa Labuan dibangun tempat sentra penghasil kerapu yang bernama "Kampung Kerapu". Kampung kerapu memiliki luas lahan tambak mencapai 47 Ha dengan jumlah petani tambak 95 orang yang tergabung dalam Kelompok Tani Bakti Usaha I dan II dan berkembang hingga saat ini menjadi 125 orang. Kampung kerapu pun menjadi salah satu sentra ekonomi andalan yang patut diperhitungkan dengan produksi mencapai 6 ton per-Hektarnya untuk masa pemeliharaan 6-8 bulan. (lamongan.go.id)

Sebelum adanya program GEMERLAP, budidaya kerapu sudah menjadi andalan bagi masyarakat Desa Labuhan dalam mengembangkan perekonomian. Ditambah lagi Kelompok Tani Bakti Usaha I dan II yang pernah mendapat beberapa penghargaan dan salah satunya penghargaan tingkat nasional di bidang perikanan yaitu pernah mendapatkan juara II dan III tingkat nasional

sebagai budidaya kerapu tambak terbaik. Berdasarkan petunjuk teknis program GEMERLAP, program ini diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha dengan melakukan pengajuan kepada dinas terkait melalui proposal pengajuan bantuan. Namun setelah melakukan observasi awal, peneliti menemukan kejanggalan bahwa kelompok tani budidaya kerapu di Desa Labuhan tidak pernah melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan dari program GEMERLAP.

Gabungan Kelompok Tani Bakti Usaha I dan II mulai mendapat bantuan dari program GEMERLAP pada tahun 2011. Berdasarkan observasi awal, bantuan yang diberikan pelaksana GEMERLAP kepada petani tambak budidaya kerapu dari tahun 2011 adalah bantuan bibit kerapu, keramba, jaring apung, kemudian melalui program GEMERLAP juga diberikan bantuan mesin penggiling pakan dan drum drum besar untuk wadah ikan yang telah dipanen, namun bantuan tersebut yaitu peralatan yang telah diberikan beberapa tidak terpakai. Selain permasalahan tadi, terdapat permasalahan lain dimana tidak ada fasilitator serta konsultan pendamping yang dilibatkan dari kalangan akademisi dan LSM. Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan GEMERLAP dimana terdapat fasilitator dan konsultan pendamping yang bertugas mendampingi Program GEMERLAP dan melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Ketua Program.

Dengan melihat pada fenomena yang ditemukan diatas maka peneliti ingin mengetahui tingkat keberhasilan program GEMERLAP dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat pedesaan secara mandiri serta mengurangi kemiskinan. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam. Penelitian yang akan dilakukan mengarah pada kegiatan evaluatif, yakni memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan dengan membandingkan pada pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Kegiatan evaluatif ini dipilih oleh peneliti, karena fenomena-fenomena yang bermunculan dalam khasanah penelitian ini menampakkan beberapa hal yang cenderung janggal bila melihat dari sisi tujuan program GEMERLAP yang tertera dalam pedoman umum program GEMERLAP. Dengan demikian, peneliti mengambil judul: Evaluasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di desa Labuahn Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Evaluasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di desa Labuan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (Studi Pada Budidaya Ikan Kerapu)

Penelitian ini menggunakan teori kriteria untuk mengevaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003:429)

merumuskan 6 (enam) kriteria dalam evaluasi sebagai berikut:

a. Efektifitas (effectiveness)

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektifitas yang berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan yang nilai moneterinya

b. Efisiensi (efficiency)

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi yang sinonim dengan rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang umumnya diukur dengan biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mempunyai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi

c. Kecukupan (adequacy)

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini menekankan kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang dicapai. Misalnya kebijakan yang memadai adalah kebijakan yang memaksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya tetap yang sama, meminimalkan biaya dalam mencapai tingkat efektifitas yang tetap

d. Kesamaan (equity)

Kesamaan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisien dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini terjadi karena mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mapu membayar dibebani biaya yang tidak proporsional atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.

e. Responsivitas (responsiveness)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan (appropriateness)

Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas subtansif karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

**METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Subjek penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui dan mempunyai pengalaman dengan fokus penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program GEMERLAP di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang sengaja ditentukan oleh peneliti akan tetapi tidak melalui proses pemilihan

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Soekarno, SH selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Bakti Usaha yang bertempat tinggal di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
2. Bapak Emil, Bapak Ir. H. Wafiq Ismail, Bapak Mulikan, Bapak Mudhofar selaku petani tambak budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
3. Bapak Afnan Efendi selaku Kepala Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
4. Ibu Retha selaku Staff sub bidang pertanian bidang ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan.
5. Ibu Panca selaku Kepala bidang budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer  
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain: catatan, buku, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Data sekunder berupa dokumen dari kantor Desa Labuhan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, maupun Badan Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Lamongan yang sangat berguna untuk mendukung sumber data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Deskripsi Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Desa Labuhan merupakan salah satu desa di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 3 dusun RW dan 30 RT dengan jarak 63 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan, apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor ± 2 jam perjalanan. Desa Labuhan memiliki luas wilayah administrasi 763,049 ha/m2

Desa Labuhan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan

Tabel 1  
Potensi Sumber Daya Alam Desa Labuhan

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume
1	Lahan pertanian	9 Ha
2	Lahan Tambak	43,72 Ha
3	Hutan desa/hutan mangrove	25 Ha

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Labuhan, 2016

Visi Desa Labuhan adalah: “Terwujudnya Desa Labuhan Yang Rukun dan Makmur Berlandaskan Moral agama serta Terdepan Dalam Bidang Perikanan

2. Deskripsi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP)

Program GEMERLAP merupakan program daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus penanggulangan kemiskinan dengan ditandai berkembangnya sentra-sentra industri ekonomi pedesaan sebagai wujud inovasi masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.

Tujuan Program GEMERLAP

- a. Menggerakkan lebih terencana, terarah dan terukur ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberian bantuan modal (hibah/pinjaman) bergulir, mengaktifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis

inovasi, dan merehabilitasi atau membangun sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa.

- b. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan.
- c. Mengembangkan produk unggulan tiap desa, dan menciptakan akses pasar lokal menuju regional, nasional dan global.
- d. Meningkatkan peran dan koordinasi SKPD dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- e. Meningkatkan kemitraan dan sinergitas stake holders (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam membangun pedesaan yang berkelanjutan.

Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong kabupaten Lamongan menggunakan teori William N. Dunn yaitu:

#### 1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Kriteria efektivitas dalam hal ini melihat sejauh mana Program GEMERLAP di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Labuhan serta menanggulangi kemiskinan.

Program GEMERLAP di Desa Labuhan belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal. Dilihat dari tujuan yang pertama, Program GEMERLAP di Desa Labuhan telah tercapai dibuktikan dengan adanya kelompok tani di Desa Labuhan dengan usaha kelompok berupa budidaya kerapu yang sedang dijalankan serta adanya bantuan yang diberikan kepada kelompok tani di Desa Labuhan, namun bantuan tersebut beberapa tidak dimanfaatkan oleh petani.

Efektivitas Program GEMERLAP di Desa Labuhan juga berkaitan dengan seberapa jauh manfaat yang diterima oleh petani kerapu Desa Labuhan. Program GEMERLAP di Desa Labuhan juga belum dapat dirasakan manfaatnya oleh petani kerapu karena pelaksanaannya hanya sebatas memberikan bantuan sarana-prasarana yang tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di Desa Labuhan



Gambar1. Keramba yang tidak digunakan  
Sumber: data primer diolah, 2016

Berkaitan dengan manfaat, Program GEMERLAP juga tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Desa Labuhan karena sebelum adanya Program GEMERLAP di Desa Labuhan, keadaan ekonomi masyarakat Labuhan sudah baik, jadi adanya Program GEMERLAP tidak membawa pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat Desa Labuhan

#### 2. Efisiensi (*efficiency*)

Dari aspek efisiensi, belum dapat dikatakan sepenuhnya efisien. Berdasarkan pedoman umum dan petunjuk teknis GEMERLAP yang telah ditetapkan bahwa setiap desa yang menerima Program GEMERLAP didampingi oleh fasilitator dan konsultan pendamping yang berasal dari kalangan akademisi dan LSM yang ada di Kabupaten Lamongan yang bertugas mendampingi, membina, dan memantau perkembangan kelompok sasaran dalam mengembangkan potensi daerahnya. Dalam hal ini, Program GEMERLAP yang dilaksanakan di Desa Labuhan tidak memiliki fasilitator dan konsultan pendamping sesuai petunjuk teknis GEMERLAP hal tersebut dikarenakan masyarakat petani Desa Labuhan dianggap telah mandiri dan usahanya telah berkembang baik. Hal tersebut merupakan efisiensi dari pelaksana GEMERLAP di Desa Labuhan, namun di sisi lain hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman umum GEMERLAP.

Dari segi pelatihan-pelatihan pengembangan SDM, juga masih belum efisien karena pelatihan-pelatihan tidak diterima seluruh petani Desa Labuhan. Dari segi dana dapat dikatakan efisien karena dengan dana yang terbatas, pelaksana GEMERLAP dapat menjangkau banyak kelompok penerima GEMERLAP yang membutuhkan

#### 3. Kecukupan (*adequacy*)

Selain efektif dan efisien, suatu kebijakan juga harus dipastikan cukup dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Dari aspek kecukupan, adanya kebijakan diharapkan mampu memecahkan masalah. Namun, dari hasil penelitian mengenai Program GEMERLAP fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menuntaskan permasalahan di Desa Labuhan. Bantuan yang diberikan oleh pelaksana belum mencukupi kebutuhan petani Desa Labuhan karena jumlahnya yang sangat sedikit

Tabel 2.  
Jumlah bantuan Program GEMERLAP di Desa Labuhan

Tahun	Jenis bantuan	Jumlah	Sumber dana
2011	Keramba, drum	3 unit	APBD 2011
2012	Jaring apung pendederan ikan kerapu	1 unit	APBD 2012
2013	kincir air	4 unit	APBD 2013
2013	Ikan kerapu, pakan pellet local, pakan pellet ekspor	45 paket	Dana Bantuan Hibah TA 2013
2014	Peralatan mesin pembuat pakan ikan	3 unit	DAK

Sumber: data primer diolah, 2016

#### 4. Perataan (*equity*)

Terkait perataan, untuk melihat Program GEMERLAP didistribusikan secara merata atau tidak dapat dilihat dari besarnya bantuan yang diberikan kepada setiap petani di Desa Labuhan. Setelah memberikan bantuan kepada kelompok tani di Desa Labuhan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan tidak memiliki keharusan untuk membagikan bantuan tersebut kepada setiap anggota dari kelompok tani di Desa Labuhan terkait pembagian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kelompok petani.

Meskipun bantuan yang diberikan oleh pelaksana GEMERLAP sebisa mungkin didistribusikan secara merata ke seluruh anggota kelompok petani Di Desa Labuhan dengan berbagai upaya yaitu apabila barang bantuan dari dinas tidak dapat dibagi maka barang tersebut di lelang untuk menciptakan keadilan. Di sisi lain dari segi pelatihan yang telah disebutkan pada kriteria efektifitas, pelatihan-pelatihan belum didistribusikan secara merata kepada seluruh petani Desa Labuhan karena tidak semua petani Desa Labuhan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas.

#### 5. Responsifitas (*responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dari aspek responsifitas, berdasarkan hasil penelitian pada awalnya respon petani cukup baik perihal adanya Program GEMERLAP di Desa Labuhan namun respon tersebut menurun karena Program GEMERLAP dirasa tidak membawa

pengaruh yang besar terhadap perkembangan budidaya kerapu Desa Labuhan.

Dilihat dari segi lain yakni dari segi pemanfaatan dan pemeliharaan barang-barang serta alat yang berasal dari Program GEMERLAP, hal ini mendapat respon yang kurang baik dari petani kerapu Desa Labuhan Kecamatan Brondong. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan pemanfaatan bantuan yang kurang baik oleh petani kerapu. Bantuan-bantuan yang diberikan berupa alat atau barang untuk budidaya beberapa tidak terpakai.

#### 6. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria yang terakhir adalah ketepatan yang mengukur kebijakan dengan melihat pada hasil (tujuan) apakah sudah benar-benar bernilai atau berguna dan apakah suatu kebijakan tersebut telah mencapai ketepatan akurat. Dari segi ketepatan Program GEMERLAP di Desa Labuhan kurang tepat sasaran. Program yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, namun kenyataannya masyarakat petani Desa Labuhan memiliki usaha yang besar ditandai dengan pemasarannya yang telah mencapai skala global dengan omset milyaran.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Program GEMERLAP di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan bahwa program GEMERLAP belum mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Program GEMERLAP di Desa Labuhan dilihat dari kriteria efektifitas masih dikatakan belum efektif dibuktikan dengan bantuan yang tidak memberikan manfaat untuk petani Desa labuhan. Program ini juga dirasa kurang efisien dalam hal dana, tidak adanya fasilitator dan konsultan pendamping, serta Program GEMERLAP di Desa Labuhan tidak tepat sasaran apabila diberikan kepada masyarakat Labuhan dengan usahanya yang sudah berkembang. Dalam kriteria responsifitas, respon masyarakat petani kurang ditandai dengan tidak adanya kemauan dalam mengajukan permohonan bantuan melalui proposal. Meskipun Program GEMERLAP di Desa Labuhan dikatakan telah merata namun perataan tersebut dilakukan oleh petani kerapu Desa labuhan sendiri. selain itu dari kriteria kecukupan, bantuan dari Program GEMERLAP juga sangat sedikit sehingga belum mencukupi kebutuhan petani kerapu Desa Labuhan

### Saran

Setelah mengetahui hasil evaluasi kebijakan pada Program GEMERLAP di Desa Labuhan, maka penulis memberikan rekomendasi agar Program GEMERLAP di

Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dapat diteruskan dengan melakukan perbaikan atas hal-hal yang kurang sesuai. Maka dari itu, penulis mencoba menawarkan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan yaitu yaitu mengubah kebijakan menjadi bersifat bottom-up, selain itu menyelesaikan kendala berupa dana dengan menambah anggaran dana untuk pelaksanaan program selanjutnya, melakukan pendampingan untuk mengembangka produk Desa Labuhan ikan kerapu menjadi produk olahan lain, selain itu program GEMERLAP diberikan kepada kelompok yang lebih tepat serta diharapkan pelaksana GEMERLAP dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam pelaksanaan GEMERLAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/76/Kep/413.013/2011 tentang Tim Pelaksana Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP)
- Lamongan Dalam Angka Tahun 2012
- Neliyanti dan Heriyanto, Meyzi. 2013. "Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir". *Jurnal Kebijakan Publik* Volume 4 No. 1. Hal. 1-118.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT Ele Media Komputindo
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP)
- Pedoman Umum GEMERLAP, 2011
- Petunjuk Teknis GEMERLAP, 2011
- Purwanto, Erwan Agus. 2007. "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3: hal. 295-324
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Sartika, Ika. 2012. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*. Skripsi tidak diterbitkan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wulan, Kurnia Tri Retno. 2014. *Implementasi Kebijakan Program GEMERLAP sebagai Inovasi dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)*. Skripsi tidak diterbitkan: Universitas Brawijaya
- Zuriah, N. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori- Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2015, pukul 21.00 WIB
- <http://www.lamongan.go.id>, diakses pada tanggal 2 Desember 2015, pukul 20.22 WIB